

# **KAJIAN HUKUM ATAS PENGATURAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERKLASIFIKASI RAHASIA DALAM BIDANG PERSANDIAN**

**Paramitha**

## **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hambatan dan pengaturan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara dalam bidang persandian. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis.

Barang Milik Negara merupakan aset negara yang diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014. Penghapusan Barang Milik Negara dalam bidang persandian merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Untuk mewujudkan tertib penghapusan perlu dibuat pengaturan, namun saat ini belum ada aturan mengenai pengaturan penghapusan Barang Milik Negara berklasifikasi rahasia secara nasional dan komprehensif.

Peraturan mengenai penghapusan Barang Milik Negara berklasifikasi rahasia dalam bidang persandian adalah Perka Lemsaneg Nomor 5 Tahun 2009. Peraturan ini dibuat sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2011, maka kualifikasi dan kekuatan hukum dari peraturan ini hanyalah sebagai aturan kebijakan.

Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu bahwa peraturan mengenai penghapusan Barang Milik Negara berklasifikasi rahasia dalam bidang persandian hanya berupa Peraturan Kepala, dimana kualifikasi dan kekuatannya hanyalah sebagai aturan kebijakan. Sejalan dengan teori sistem hukum Friedman, maka diperlukan Undang-Undang yang kedudukannya sederajat dengan PP Pengelolaan Barang Milik Negara yang di dalamnya memuat struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum penghapusan Barang Milik Negara berklasifikasi rahasia dalam bidang persandian.

**Kata Kunci** : Kajian Hukum, Barang Milik Negara, Rahasia, Persandian

# **LEGAL STUDIES OF REGULATING THE ELIMINATION OF STATE CLASSIFIED SECRET IN THE FIELD OF CRYPTOLOGY**

**Paramitha**

## **Abstract**

This study was conducted to determine the elimination of barriers and implementation arrangements of State Property in the field of coding. Methods of research conducted through normative juridical approach using secondary data, and then analyzed by descriptive analysis.

State Property is a state asset technically regulated in Government Regulation No. 24 of 2014 on the Elimination of State Property in the field of coding is a very important aspect in the management of State Property. To realize the deletion orderly arrangements need to be made, but there is currently no rules on setting the abolition of State Assets classified as confidential and comprehensive nationwide.

Regulations concerning the abolition of the State Property berklasifikasi secret in the field coding is Perka Lemsaneg No. 5 of 2009. These regulations were made prior to the enactment of Law No. 12 In 2011, the qualifications and legal force of this regulation is simply a policy rule.

The conclusion of this study, namely that the rules concerning the abolition of State Assets classified as secret in the field of coding only form of regulation of the Head, where qualifications and legal force only as a policy rule. In line with Friedman's theory of the legal system, it would require an Act to position equal to PP State Property Management in which includes the legal structure, the substance of the law, and the legal culture of the abolition of State Assets classified as secret in the coding field.

**Keywords:** Study of Law, State Property, Classifieds, Cryptology